

## ABSTRAK

Investasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan nasional yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam pembangunan nasional tentu juga harus menjaga kepentingan nasional. Salah satu bentuk kepentingan nasional dalam investasi adalah menerapkan *performance requirement* utamanya terkait dengan *local content*. Akan tetapi dalam Perjanjian Internasional seringkali melarang adanya aturan *local content*, seperti pada Perjanjian *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dan *World Trade Organization* (WTO). Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum untuk menkonstruksikan substansi pengaturan *local content* dalam Perjanjian TPP, WTO, dan hukum positif Indonesia, serta melakukan penilaian visiabilitas terhadap keinginan Indonesia untuk bergabung dalam Perjanjian TPP dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum ini menghasilkan temuan bahwa Indonesia masih menerapkan aturan *local content* dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam WTO dan Perjanjian TPP aturan *local content* dilarang. Dalam WTO masih terdapat kesempatan bagi negara berkembang untuk menerapkan *local content* dengan persyaratan tertentu. Sedangkan jika Indonesia bergabung dalam Perjanjian TPP, Pemerintah Indonesia akan sulit untuk melindungi kepentingan nasionalnya karena penerapan *local content* yang tidak boleh diterapkan kepada negara anggota.

**Kata kunci:** *Local Content; Trans-Pacific Partnership; World Trade Organization.*

**ABSTARCT**

*Investment is a mean to increase national development in accordance with Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Moreover the national development shall also consider the national interest. One of the types of national interest in investment is to apply performance requirement mainly related with local content. However International Agreements often proscribe the existence of local content requirement, for instance in Trans Pacific Partnership Agreement (TPP) and World Trade Organization (WTO). Such matters motivates the writer to conduct a legal research in order to construct the substances of local content in TPP agreement, WTO, and Indonesian Laws and Regulations and conduct visibility research towards Indonesian Government's desires to join with TPP agreement. This legal research will use Laws and Regulation approach and conceptual approach. This legal research finds that Indonesia still regulates local content requirements in its National Laws and Regulations, whereas such regulations is prohibited both in WTO and TPP agreement. WTO still give chance to apply local content under some requirements meanwhile if Indonesian Government joins in TPP agreement, Indonesia would have difficulties to protect its national interest since local content rules are prohibited.*

**Keywords:** *Local Content; Trans-Pacific Partnership; World Trade Organization.*